

BAB I

PENDAHULUAN

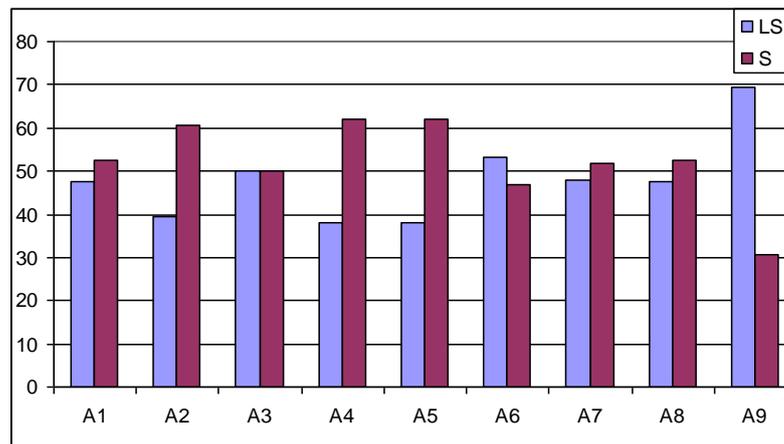
A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada hakikatnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa, oleh karena itu diperlukan sebuah proses pendidikan yang bermutu. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 4 menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Suharsaputra, 2010, hlm. 232). Berdasarkan hal tersebut, maka setiap sekolah harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan guna memenuhi mutu pendidikan yang baik.

Mutu pendidikan merupakan salah satu pelayanan yang diarahkan untuk mengukur kepuasan stakeholder, guna memenuhi kepuasan stakeholder tersebut maka diperlukan pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang maksimal adalah suatu upaya yang dilakukan sekolah dalam melayani stakeholdernya dengan sebaik-baiknya melalui pendidikan yang berkualitas. Deming (dalam Sobahi, dkk., 2010, hlm. 154) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan. Maka dari itu, sebuah pelayanan yang baik diperlukan pengelolaan atau manajemen sekolah yang baik.

Untuk meningkatkan pengelolaan atau manajemen yang baik, sekolah harus mampu meningkatkan kapasitas manajemen yang dimilikinya. Kapasitas Manajemen Sekolah adalah potensi dan aktualisasi potensi yang dimiliki sekolah, termasuk potensi yang berada di organisasi dan sumber daya sekolah yang berada disekitar lingkungan sekolah yang dapat didayagunakan untuk mendukung, memelihara, dan mengembangkan mutu proses belajar mengajar (Komba, dkk., dalam *hiroshima-u.ac.jp*).

Namun pada kenyataannya, masih banyak sekolah yang dihadapkan pada permasalahan layanan pendidikan yang mengakibatkan pendidikan jauh dari harapan stakeholder dan berdampak pada mutu yang rendah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data Bappenas (2009, hlm. 4) yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Tingkat Kepuasan Orangtua terhadap Sembilan Atribut Pelayanan Pendidikan Dasar pada Jenjang SD (%).

Catatan: LS= Kurang Puas; S= Puas

A1= Kualitas Proses Pembelajaran; A2= Kualitas Pengajaran; A3= Hasil dari Proses Pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak; A4= Kondisi kenyamanan sekolah; A5= Menjaga disiplin dan keamanan di sekolah; A6= Keterlibatan orangtua; A7= Kualitas Fasilitas Fisik; A8= Kesiapan alih tahun pelajaran; A9= Ketersediaan Biaya Sekolah Anak (Bappenas, 2009 : 4).

Gambar diagram diatas, menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat Sekolah Dasar yang dihadapkan pada persoalan serius. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan orang tua terhadap sembilan atribut pelayanan pendidikan yang terdiri dari kualitas proses pembelajaran, kualitas pembelajaran, hasil dari proses pembelajaran yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia anak, kondisi kenyamanan sekolah, menjaga kedisiplinan dan keamanan di sekolah, keterlibatan orangtua, kualitas fasilitas fisik, kesiapan alih tahun pelajaran dan ketersediaan biaya sekolah anak.

Selanjutnya hasil evaluasi capaian standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kota Bandung belum mencapai target. Target yang ditetapkan sebesar 80% (658 SD) dalam pencapaian SPM, baru terealisasi 78,66% (645 SD), dengan capaian kinerja sebesar 98,31%. (LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2014).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa kemampuan pelayanan manajemen Sekolah Dasar di Indonesia dan di Kota Bandung masih rendah. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa kapasitas sekolah dalam melakukan pengelolaan/manajemen masih rendah dan sekolah belum memiliki kekuatan penuh untuk berubah serta merespon tuntutan perkembangan zaman. Sekolah saat ini tidak berdaya dengan berbagai kondisi internal dan eksternal yang dihadapi secara nyata.

Analisis permasalahan penyelenggaraan pendidikan bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) yang menyelenggarakan pendidikan itu sendiri. Jika SDM pengelola dan penyelenggaraan pendidikan memiliki profesionalitas yang memadai/dipersyaratkan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan akan dinilai lebih baik. Namun dilihat dari kompetensi sebagai komponen penunjang profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, kondisinya menunjukkan bahwa kompetensi pendidik belum profesional (Triatna, 2015, hlm.8). Hal tersebut terlihat dari data pemenuhan kualifikasi guru yang menunjukkan bahwa 22,66% telah memenuhi SPM dan 77,34% belum memenuhi standar pelayanan minimal tenaga pendidik dan kependidikan (LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2014).

Rendahnya kapasitas manajemen sekolah tersebut menjelaskan bahwa sekolah belum mampu menjalankan pengelolaan/manajemen sekolah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional yang terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Triatna (2015, hlm. 13) pada SD, SMP dan SMA/SMK menunjukkan adanya permasalahan terkait kapasitas manajemen sekolah diantaranya:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah merasa berat memenuhi berbagai kebijakan nasional atau pemerintah, seperti implementasi kurikulum 2013.
2. Pengembangan kapasitas sekolah sulit dilakukan karena pendidik dan tenaga kependidikan serta fasilitas terbatas.
3. Banyak guru yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan pembelajaran.

Menurut pendapat Sumintono (dalam Dwi, dkk., 2016, hlm 352) bahwa sekolah yang tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan yang cukup jelas, maka akan kesulitan dalam melakukan berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan secara efektif. Untuk itu diperlukan sebuah upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pengembangan kapasitas sekolah terutama dalam pengelolaan/manajemen sekolah.

Lambert (dalam Triatna, 2015, hlm. 15) menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah rendahnya kapasitas manajemen sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik, maka diperlukan sebuah pengembangan kapasitas sekolah yang terintegrasi dengan keseharian sekolah. Stoll (2010, hlm. 470) mengartikan pengembangan kapasitas manajemen sekolah sebagai kapasitas dalam konteks perubahan yaitu “suatu kekuatan untuk melakukan dan menjaga keberlangsungan belajar orang-orang pada semua level sistem pendidikan yang tujuannya sama, yaitu meningkatkan mutu belajar peserta didik”.

Dalam hasil penelitian Cipi Triatna (2014, hlm. 133) menunjukkan bahwa:

pengembangan kapasitas manajemen sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan disekolah melalui implementasi keteladanan kepemimpinan, kegiatan belajar bersama diantara pendidik dan tenaga kependidikan melalui praktik manajemen keseharian, pengembangan kreativitas dalam pemecahan masalah dan penyediaan kondisi-kondisi yang mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Sesuai dengan hal tersebut maka pengembangan kapasitas manajemen sekolah melalui peran kepala sekolah terhadap para personel atau warga sekolah, salah satunya dapat diwujudkan melalui belajar bersama.

Menurut Senge untuk meningkatkan kapasitas organisasi dapat ditempuh melalui proses belajar (Ferry Roen, 2011). Dalam rangka mewujudkan belajar bersama pada konteks manajemen sekolah, maka diperlukan sebuah peran kepala sekolah. Dimana kepala sekolah merupakan pemimpin sekolah yang memiliki peran sebagai penggerak kehidupan sekolah guna mencapai tujuan. Sebagai pemimpin, kepala sekolah memerlukan sebuah strategi belajar yang mampu menciptakan sumber daya manusia di sekolah. Belajar bersama dalam konteks pengembangan kapasitas manajemen sekolah dapat diwujudkan melalui strategi belajar yang dikembangkan kepala sekolah dalam pembangunan visi, misi dan tujuan sekolah, penyusunan rencana kerja sekolah, pengimplementasian program kerja sekolah dan melaksanakan evaluasi keberhasilan program sekolah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan proses kerjasama antar warga sekolah. Tim belajar bersama dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah baik itu guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, peserta didik, orang tua siswa. Sobahi, dkk. (2010, hlm. 117) mengatakan bahwa pembelajaran tim adalah mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir (*thinking skills*), sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan kemampuan yang lebih besar dibanding ketika masing-masing anggota kelompok bekerja sendiri.

Selain itu, hasil analisis A. De. Gues (dalam Triatna, 2015, hlm. 9), menunjukkan bahwa upaya organisasi untuk dapat atau mampu memberikan layanan yang bermutu, dapat beradaptasi, memenangkan persaingan dan menjadi organisasi yang berhasil maka setiap organisasi harus memiliki kemampuan untuk terus belajar. Namun, fenomena Sekolah Dasar saat ini masih belum memiliki kemampuan untuk terus belajar, baik sebagai individu, kelompok maupun sistem sekolah. Oleh karena itu, proses belajar bersama antar warga sekolah perlu dikembangkan.

Collison (2008, hlm. 456) mengatakan bahwa “kesuksesan organisasi dalam masa atau periode tidak menentu (*abad 21*) ini adalah memahami bahwa belajar dan inovasi merupakan dua hal yang pokok untuk pembaruan dan keberlangsungan organisasi”. Hal tersebut dapat dipahami bahwa keunggulan organisasi di masa depan terletak pada kemampuan belajar dan berinovasi SDM pada organisasi.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan Sekolah Dasar diatas, maka penulis merancang untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belajar bersama oleh kepala sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah penelitian

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah belajar bersama oleh kepala sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah kapasitas manajemen sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh belajar bersama oleh kepala sekolah terhadap kapasitas manajemen Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan upaya peneliti untuk menjabarkan rumusan masalah yang akan dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Belajar bersama oleh kepala sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang Belajar bersama oleh kepala sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.
- b. Untuk memperoleh gambaran tentang Kapasitas Manajemen Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belajar bersama oleh kepala sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/signifikansi dalam beberapa aspek. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat/Signifikansi Dari Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan bidang kajian ilmu Administrasi Pendidikan khususnya dalam Manajemen Sekolah dan mengenai pengaruh Belajar Bersama oleh Kepala Sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.

2. Manfaat/Signifikansi Dari Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, khususnya mengenai pengaruh Belajar bersama oleh kepala sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah terutama Kepala Sekolah tentang betapa pentingnya belajar bersama oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kapasitas manajemen sekolah.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Secara garis besar struktur organisasi penelitian ini terbagi menjadi lima bagian atau bab. Adapun struktur organisasi dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan dalam skripsi pada dasarnya menjadi bab perkenalan. Pada bab ini dipaparkan hal-hal mengenai: latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

b. BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisikan beberapa sub-bab yang terdiri dari: 1) Kapasitas Manajemen Sekolah, 2) Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah, 3) Belajar bersama dalam konteks pengembangan kapasitas manajemen sekolah, 4) Pengaruh belajar bersama terhadap kapasitas manajemen sekolah, 5) Penelitian Terdahulu, 6) Kerangka Pikir Penelitian, dan 7) Hipotesis Penelitian

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperluas gambaran mengenai pengaruh belajar bersama oleh kepala sekolah terhadap kapasitas manajemen sekolah.

d. BAB IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini menyampaikan dua hal utama dalam penelitian, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan, analisis data dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

e. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan tentang penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.